

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan struktural yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional di Indonesia. Pemerintah terus berupaya mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program, salah satunya penyediaan akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, sektor kesehatan memegang peran penting sebagai indikator kualitas hidup sekaligus faktor penentu produktivitas ekonomi masyarakat (Pratiwi et al., 2021; Yesi et al., 2024).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang hadir sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana seluruh penduduk memiliki akses finansial dan geografis terhadap layanan kesehatan bermutu tanpa mengalami kesulitan finansial. Sejak diimplementasikan pada tahun 2014, JKN menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan memastikan seluruh penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan biaya (Alkayyis, 2024; Rizky Perdana et al., 2022).

Dalam program kesehatan ini, Pemerintah telah memfokuskan sistem kesehatan Universal Health Coverage (UHC) dengan Cakupan Kesehatan Semesta di mana semua orang mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang mereka perlukan tanpa harus mengalami kesulitan keuangan. Layanan ini mencakup pencegahan, pengobatan, pemulihan, dan layanan kesehatan lainnya yang berkualitas, terjangkau, dan merata untuk seluruh penduduk suatu negara. Tujuan utamanya adalah memastikan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dan berdasarkan data terbaru, Indonesia telah mencapai status UHC pada 14 Maret 2024, dengan lebih dari 95% penduduk terdaftar sebagai peserta JKN

Hal ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam sistem kesehatan nasional. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi JKN-UHC, seperti kualitas layanan kesehatan yang belum merata di berbagai daerah, pembiayaan yang berkelanjutan, serta kepatuhan peserta dalam membayar iuran (Alkayyis, 2024; Hanani et al., 2025; Risyanda, 2025).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional mensyaratkan setiap warga negara Indonesia wajib menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan sebagai prasyarat dalam mengakses beberapa layanan publik. Di Kabupaten Bogor, instruksi tersebut telah ditindaklanjuti dengan kebijakan tertanggal 1 Juni 2024 yang mewajibkan semua instansi pemerintah desa mengimplementasikan JKN-UHC, serta mendaftarkan masyarakat tidak mampu agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Safitri & Fauziah, 2023).

Sebagai hasil dari langkah tersebut, capaian UHC di Kabupaten Bogor per 1 Agustus 2024 mencapai 97,04%, sehingga Kabupaten Bogor meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kategori Pratama dalam pencapaian UHC dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Pada tingkat lokal, seperti di Desa Cicadas, Kabupaten Bogor, meskipun program BPJS Kesehatan telah diimplementasikan secara luas, tidak semua warga miskin dapat memanfaatkannya secara optimal. Beberapa faktor seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat BPJS, keterbatasan infrastruktur kesehatan, serta ketidak efektifan koordinasi antar lembaga menyebabkan cakupan layanan kesehatan belum sepenuhnya merata. Padahal, akses kesehatan yang baik sangat berkontribusi dalam menekan risiko kemiskinan yang dipicu oleh biaya kesehatan yang tinggi. Sehingga akibat biaya pengobatan yang tinggi menjadi penyebab hilangnya produktivitas dan akan berdampak terhadap kualitas hidup yang dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga miskin.

Sebaliknya, kemiskinan dapat membatasi akses terhadap makanan bergizi, sanitasi yang layak, dan layanan kesehatan yang berkualitas (Sofia Diaz et al., 2024; Wenang et al., 2021).

Maka dari itu, dibutuhkan strategi pengentasan kemiskinan yang holistik dan integratif, salah satunya melalui optimalisasi peran BPJS Kesehatan. Dengan mengoptimalkan fungsi BPJS sebagai instrumen perlindungan sosial di bidang kesehatan, yang diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat miskin agar tetap memiliki akses layanan kesehatan yang berkualitas, sehingga meningkatkan taraf hidup dan kapasitas ekonomi mereka sesuai dengan keterkaitan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan tujuan ke-1 (Tanpa Kemiskinan) (Ade Rizky Anantya et al., 2024; Asyari & Budiarsih, 2022).

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Pencapaian program Universal Health Coverage (UHC) dalam upaya pengentasan kemiskinan Di Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas program JKN-UHC di tingkat desa sekaligus mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ekonomi dan akses kesehatan di Desa Cicadas, Kabupaten Bogor?
2. Apakah implementasi program UHC di Desa Cicadas telah berjalan secara optimal di Desa Cicadas, Kabupaten Bogor?

3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pada pencapaian program UHC dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Cicadas.?
4. Strategi apa saja yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas program UHC dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Cicadas?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kondisi Ekonomi dan akses layanan kesehatan di Desa Cicadas.
2. Mengevaluasi implementasi program BPJS Kesehatan di Desa Cicadas.
3. Mengetahui faktor-faktor Penghambat dan Pendukung pencapaian program UHC dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Cicadas.
4. Merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas program UHC dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Cicadas.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah : Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan akses kesehatan dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Bagi Masyarakat Desa Cicadas : Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam mengakses layanan kesehatan dan mendorong partisipasi aktif dalam program UHC.
3. Bagi Penulis : Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang implementasi program UHC dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik di bidang kesehatan masyarakat dan pembangunan desa.

